LAPORAN AKHIR

MENGEKSPLORASI HUBUNGAN ANTARA AGAMA, NEGARA, DAN EKONOMI: SEBUAH STUDI GLOBAL

LESTARI AGUSALIM

UNIVERSITAS TRILOGI

2025

ABSTRAK

Agama memainkan peran penting tidak hanya dalam membentuk perilaku individu dan kelompok tetapi juga dalam memengaruhi struktur pemerintahan dan kinerja ekonomi. Banyak negara memasukkan agama ke dalam konstitusi mereka, dengan beberapa mengadopsi agama resmi negara sebagai dasar pemerintahan, sehingga menciptakan negara teokratis. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara agama dan tata kelola negara, serta hubungan antara agama dan kinerja ekonomi. Data diambil dari World Bank dan Pew Research Center, yang mencakup data PDB per kapita untuk periode 1990 dan 2022 di 133 negara, serta estimasi populasi global berdasarkan agama pada tahun 2050 melalui teknik komponen-kohort. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan komparatif untuk mengkaji hubungan antara agama, tata pemerintahan, dan performa ekonomi negara. Studi ini menemukan bahwa negara-negara dengan agama resmi negara, yang didukung oleh pemerintah yang kuat dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana, cenderung mencapai hasil ekonomi yang lebih baik, sebagaimana dibuktikan oleh tingkat PDB per kapita yang tinggi. Sebaliknya, negara-negara dengan pemerintahan yang lemah atau tanpa dukungan agama yang jelas sering mengalami stagnasi ekonomi. Temuan ini merekomendasikan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Negara Teokratis; Agama Resmi Negara; Kinerja Ekonomi; PDB per Kapita.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan akhir penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini berjudul "Mengeksplorasi Hubungan Antara Agama, Negara, dan Ekonomi: Sebuah Studi Global" yang bertujuan untuk memahami pengaruh agama terhadap tata pemerintahan dan kinerja ekonomi di berbagai negara.

Laporan ini memaparkan hasil analisis data dari World Bank dan Pew Research Center yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan agama resmi dan pemerintahan yang kuat cenderung memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik. Temuan ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana integrasi nilai-nilai agama dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkeadilan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini.

Jakarta, 13 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK …..……..... ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI ……..... iv
1 PENDAHULUAN 1
2 METODE PENELITIAN …..... 4
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 5
4 PENUTUP ……..…..... 22
DAFTAR PUSTAKA 23

1 PENDAHULUAN

Agama tidak hanya menjadi faktor yang memengaruhi perilaku individu maupun kelompok, tetapi juga memainkan peran yang mendalam dalam membentuk sistem pemerintahan suatu negara. Kehadiran agama dapat melahirkan negara teokrasi dimana doktrin agama menjadi landasan kebijakan dan keputusan negara. Pengaruh ini juga merambah hingga ke kesejahteraan ekonomi, menjadikan hubungan antara agama dan tata kelola negara sebagai salah satu isu yang kompleks dan sering kali kontroversial (Agusalim & Karim, 2023, 2024a, 2024b). Di berbagai negara, keterlibatan agama dalam struktur pemerintahan menciptakan ketegangan yang berdampak pada pluralisme dan kebebasan beragama. Goldstein (2022) mencatat bahwa negara dengan basis keagamaan cenderung mengistimewakan kelompok agama tertentu yang pada gilirannya dapat memunculkan konflik sosial serta ketidakstabilan ekonomi. Dalam konteks global, peran agama berbeda-beda. Negara-negara sekuler seperti di Eropa mungkin menunjukkan pengaruh yang terbatas, sedangkan negara-negara yang mayoritas penduduknya religius sering kali menjadikan ideologi agama sebagai instrumen negara (Minarik, 2021). Selain itu, Öhlmann (2023) menyoroti pentingnya praktik sosial keagamaan sebagai mediator antara negara dan rakyat, sedangkan Öztürk dan Başer (2022) menunjukkan bagaimana komunitas agama mampu memengaruhi kebijakan domestik maupun global dengan dampak ekonomi yang luas.

Peran agama dalam tata kelola negara tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya yang panjang sebagai institusi sosial yang memengaruhi legitimasi dan stabilitas politik. Sejak zaman kuno hingga modern, agama sering menjadi sarana bagi penguasa untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan memperkuat legitimasi mereka. Hubungan erat antara agama dan negara ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana peran agama dapat menjadi penguat stabilitas sosial atau justru sumber konflik. Dalam konteks tertentu, agama berperan sebagai penjaga moralitas publik yang dapat memengaruhi perilaku kolektif masyarakat, baik melalui kebijakan yang dirancang oleh pemerintah maupun melalui lembaga keagamaan yang bekerja di luar sistem pemerintahan formal.

Dalam dimensi ekonomi, agama memiliki peran yang tidak kalah signifikan. Di beberapa budaya, lembaga keagamaan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sementara di tempat lain, ekstremisme agama justru menjadi penghalang (Golo & Novieto, 2022). Di Nigeria, misalnya, persaingan antar kelompok agama untuk mendapatkan pengikut terbukti memengaruhi partisipasi ekonomi secara langsung (Ottuh & Eboh, 2021). Globalisasi juga memperkuat dinamika ini, membawa tantangan sekaligus peluang baru dalam hubungan antara agama dan ekonomi. Yusuf (2023) mencatat bahwa proses globalisasi tidak hanya mengubah cara agama berinteraksi dengan sistem ekonomi, tetapi juga mendorong evaluasi ulang terhadap peran agama dalam kebijakan ekonomi global. Dari perspektif historis, Weber (1905) mengungkapkan bahwa agama dapat membentuk etos kerja dan nilai-nilai seperti kejujuran dan sifat hemat, yang menjadi fondasi kapitalisme modern. Namun, studi kontemporer seperti Petach (2023) menunjukkan sisi lain, di mana tingkat keterlibatan agama yang tinggi dalam masyarakat tertentu dapat menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi. Penemuan ini menggambarkan bahwa agama bukan hanya sistem moral, tetapi juga elemen kompleks yang memengaruhi dinamika ekonomi secara mendalam.

Kehadiran agama dalam ekonomi juga melibatkan peran budaya dan kelembagaan yang memengaruhi kebijakan publik dan praktik ekonomi. Barro dan McCleary (2019) berargumen bahwa agama dapat menjadi salah satu aspek budaya yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pembentukan norma sosial yang mendukung kerja keras dan efisiensi. Perspektif ini didukung oleh Spolaore dan Wacziarg (2013), yang menunjukkan bahwa faktor-faktor jangka panjang seperti sejarah dan budaya, termasuk agama, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas dan pendapatan per kapita. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi kerangka moral bagi individu, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan struktural yang membentuk dinamika ekonomi suatu negara.

Kendati demikian, masih terdapat kekosongan dalam penelitian yang menyelidiki hubungan antara agama, negara, dan ekonomi secara holistik. Literatur yang ada sering kali memperlakukan agama dan negara sebagai entitas terpisah, sehingga mengabaikan peran agama dalam membentuk kebijakan publik dan hasil

ekonomi. Coşgel et al. (2020) menekankan pentingnya legitimasi dalam hubungan antara negara dan lembaga keagamaan, sementara Golo dan Novieto (2022) menyerukan integrasi keyakinan keagamaan dalam proses pembangunan, khususnya di wilayah seperti Afrika, di mana agama memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani gap tersebut dengan menyatukan analisis historis, sosial, dan ekonomi untuk memahami bagaimana agama berkontribusi atau menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi serta memengaruhi stabilitas sosial dan kebijakan negara.

Selain itu, globalisasi telah memberikan warna baru dalam interaksi antara agama, negara, dan ekonomi. Proses ini telah menciptakan lingkungan di mana agama tidak hanya berfungsi dalam lingkup lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam arena internasional. Öztürk dan Başer (2022) mencatat bahwa komunitas agama sering kali melampaui batas-batas nasional untuk memengaruhi kebijakan luar negeri, sehingga berdampak pada hubungan ekonomi global. Contohnya adalah bagaimana beberapa organisasi keagamaan transnasional berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui program bantuan sosial, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menavigasi kompleksitas politik dan ekonomi di tingkat global. Dalam konteks ini, agama menjadi lebih dari sekadar sistem kepercayaan; ia menjadi aktor yang signifikan dalam dinamika global.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan dan deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki hubungan antara struktur agama negara dan indikator ekonomi, khususnya PDB per kapita (Kumar et al., 2022; Zou & Zu, 2023; Barro & McCleary, 2023; Kishi et al., 2017). Secara empiris, penelitian ini bergantung pada data sekunder yang diperoleh dari dua sumber utama, yaitu Bank Dunia, yang menyediakan data PDB per kapita untuk tahun 1990 dan 2022, serta Pew Research Center, yang memperkirakan populasi global berdasarkan agama untuk tahun 2050 (Hackett et al, 2015). Penelitian ini mencakup 133 negara yang dikategorikan ke dalam empat kelompok utama berdasarkan hubungan mereka dengan agama negara: 29 negara dengan agama negara resmi, 28 negara dengan agama negara yang lebih disukai atau diutamakan, 71 negara tanpa agama resmi atau yang lebih disukai, dan lima negara dengan hubungan yang bermusuhan dengan institusi keagamaan (Kishi et al., 2017). Melalui kategorisasi ini, dapat dilakukan analisis deskriptif komparatif tentang kinerja ekonomi di antara kelompok negara-negara tersebut.

Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dan komparatif (Kumar et al., 2022; Zou & Zu, 2023). Analisis deskriptif memberikan gambaran rinci tentang literatur yang ada, mengidentifikasi pola, tren, dan tema yang relevan. Selain itu, studi kasus dari berbagai negara digunakan untuk menggambarkan bagaimana agama berinteraksi dengan sistem pemerintahan dan kerangka ekonomi. Pendekatan komparatif memungkinkan pemeriksaan lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan dalam cara agama mempengaruhi kebijakan publik dan hasil ekonomi dalam berbagai konteks budaya. Pengumpulan data menggunakan sumber sekunder, dan teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengorganisir, mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan data secara objektif, yang dilengkapi dengan temuan empiris dari studi relevan lainnya (Aguinis, 2024). Dengan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran agama dalam dinamika global, sambil mendorong evaluasi yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara agama, negara, dan ekonomi dalam membentuk dunia modern.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Agama dan Negara

Para ilmuwan sampai saat ini belum menemukan kesepakatan dalam mendefinisikan agama. Dalam kamus Oxford, agama didefinisikan sebagai kepercayaan akan adanya tuhan atau dewa-dewa, dan kegiatan yang berhubungan dengan pemujaan atau ajaran seorang pemimpin spiritual. Rujukan internasional tentang definisi agama dapat dibaca dalam tulisan ilmuwan seperti Geertz (1973), Durkheim (1912), Morreall (2014), atau Nongbri (2013).

Menurut Hirschl (2021), selama beberapa dekade terakhir, prinsip-prinsip pemerintahan teokratis telah memperoleh dukungan publik yang sangat besar di seluruh dunia. Johnson dan Koyama (2019) menjelaskan transisi dari keseimbangan toleransi bersyarat, dimana kapasitas negara yang lemah memungkinkan kelompok agama yang berbeda untuk hidup berdampingan di bawah sistem aturan identitas berbasis agama, ke keseimbangan toleransi agama, dimana negara yang kuat menerapkan aturan umum sekuler tanpa memerlukan agama sebagai kekuatan legitimasi. Ini menyiratkan bahwa legitimasi agama dan kapasitas negara yang tinggi saling bersubstitusi. Cosgel et al., (2020) mengeksplorasi kemungkinan alternatif bahwa legitimasi agama dan negara yang kuat dapat saling melengkapi, yaitu agama dan kapasitas negara yang tinggi bekerja sama untuk mengekstraksi sumber daya dari warga negara. Hasilnya adalah keseimbangan aturan umum agama dan sekuler di mana kapasitas negara yang tinggi dan agama saling memperkuat. Penerapan aturan umum di era modern berbeda secara sistematis antara masyarakat di mana kapasitas negara yang kuat adalah pelengkap daripada sebagai pengganti agama

Kishi et al., (2017) telah berhasil memetakan hubungan agama dengan negara. Bersama dengan tim pemrogram, mereka menganalisis konstitusi atau undang-undang dasar setiap negara, bersama dengan kebijakan dan tindakan resminya terhadap kelompok agama, untuk mengklasifikasikan hubungan agama dengan negara ke dalam salah satu dari empat kategori berikut. Kategori pertama, yaitu negara-negara dengan agama resmi memberikan status resmi pada agama

tertentu dalam konstitusi atau hukum dasarnya. Negara-negara ini tidak serta merta memberikan manfaat kepada kelompok agama itu di atas yang lain. Tetapi, dalam banyak kasus, mereka mendukung agama negara dalam beberapa hal. Kategori kedua, yaitu negara-negara yang mempunyai preferensi terhadap agama memiliki kebijakan atau tindakan pemerintah yang jelas-jelas mendukung satu (atau dalam beberapa kasus, lebih dari satu) agama di atas yang lain, biasanya dengan keuntungan hukum, keuangan, atau jenis praktis lainnya. Negara-negara ini mungkin atau mungkin tidak menyebutkan agama yang disukai dalam konstitusi atau undang-undang mereka; jika ya, itu sering kali sebagai agama "tradisional" atau "historis" di negara itu (tetapi bukan sebagai agama resmi negara). Beberapa negara ini juga menyerukan kebebasan beragama dalam konstitusi mereka, meskipun dalam praktiknya, mereka tidak memperlakukan semua agama secara setara.

Kategori ketiga adalah negara-negara yang tidak memiliki agama resmi atau agama pilihan berusaha untuk menghindari memberikan manfaat nyata kepada satu kelompok agama di atas yang lain (walaupun mereka bahkan dapat memberikan manfaat bagi banyak kelompok agama). Misalnya, pemerintah Amerika Serikat memberikan pembebasan pajak kepada organisasi keagamaan di bawah aturan yang berlaku sama untuk semua denominasi. Banyak negara dalam kategori ini memiliki bahasa konstitusional yang menyerukan kebebasan beragama, meskipun bahasa itu saja tidak cukup untuk memasukkan sebuah negara ke dalam kelompok ini. Tim pembuat kode harus menentukan bahwa negara-negara ini tidak secara sistematis mendukung satu atau lebih agama daripada yang lain. Kategori keempat, yakni negara-negara yang memiliki hubungan perseteruan/permusuhan terhadap agama menggunakan tingkat kontrol yang sangat tinggi atas lembaga-lembaga agama di negara mereka atau secara aktif mengambil posisi agresif terhadap agama secara umum. Beberapa negara ini mungkin memiliki konstitusi yang menyatakan kebebasan beragama, atau pemimpin yang menggambarkan diri mereka sebagai penganut agama tertentu.

Tabel 1 menunjukkan hubungan antara agama dengan sistem pemerintahan menurut negara. Terlihat bahwa terdapat 43 negara yang memiliki agama resmi, di antaranya 27 negara Islam, 13 negara Kristen, dua negara Buddha, dan satu negara

yang beragama Yahudi. Negara yang memiliki preferensi terhadap agama berjumlah 40 negara dengan komposisi secara berurutan 30 agama Kristen, empat agama Buddha, tiga agama Islam dan lima negara yang memiliki preferensi terhadap beberapa agama. Negara sekuler berjumlah 106 negara dan negara yang memiliki perseteruan dengan agama tertentu sebanyak 10 negara.

Tabel 1. Hubungan antara agama dan pemerintahan berdasarkan negara

Form of Government	Religion	Country
Official state religion (43)	Islam (27)	Afghanistan, Algeria, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Comoros, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, Malaysia, Maldives, Mauritania, Morocco, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Tunisia, United Arab Emirates, Western Sahara, Yemen.
	Christianity (13)	Armenia, Costa Rica, Denmark, Dominican Republic, Greece, Iceland, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norway, Tuvalu, United Kingdom, Zambia.
	Buddhism (2)	Bhutan, Cambodia.
	Judaism (1)	Israel.
Preferred or favored state religions (40)	Islam (3)	Sudan, Syria, Turkey.
	Christianity (30)	Andorra, Angola, Argentina, Belarus, Bulgaria, Cape Verde, Equatorial Guinea, Finland, Georgia, Guatemala, Haiti, Honduras, Italy, Liberia, Moldova, Nicaragua, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, North Macedonia, Romania, Russia, Samoa, Spain, Swaziland, Tonga.
	Buddhism (4)	Myanmar, Laos, Mongolia, Sri Lanka.
	Multiple religions (5)	Eritrea, Indonesia, Lithuania, Serbia, Togo.
No official or preferred religion (106)	-	Albania, Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of Congo, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Fiji, France, Gabon, Gambia,

Form of Government	Religion	Country
		Germany, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Latvia, Lebanon, Lesotho, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Palau, Philippines, Portugal, Republic of Congo, Rwanda, San Marino, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, South Korea, South Sudan, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Uganda, Ukraine, United States, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe.
Hostile relationship with religious institutions (10)	-	Azerbaijan, China, Cuba, Kazakhstan, Kyrgyzstan, North Korea, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam.

Source: Kishi et al., (2017), Pew Research Center

Di seluruh dunia, paling sedikit delapan dari sepuluh orang memiliki agama. Sebuah studi demografis yang komprehensif lebih dari 240 negara dan wilayah yang dilakukan oleh Hackett et al., (2015) bersama Pew Research Center (PRC) tentang agama dan kehidupan publik memperkirakan bahwa pada tahun 2020 ada 6.52 miliar orang dewasa dan anak-anak yang berafiliasi dengan agama di seluruh dunia, mewakili 84.45 persen dari populasi dunia. Penduduk agama Kristen merupakan penduduk beragama terbanyak di dunia dengan jumlah populasi 2.38 miliar orang atau 31.12 persen dari populasi dunia. Penduduk beragama Islam mempunyai populasi sebesar 1.91 miliar atau 24.91 persen dari populasi dunia. Penduduk agama Hindu berjumlah 1.16 miliar orang atau sebanyak 15.17 persen dari populasi dunia. Jumlah penduduk beragama Buddha sebanya 506.99 juta orang atau 6.62 persen dari total populasi manusia. Penduduk beragama Yahudi berjumlah 14.66 juta orang atau 0.19 persen penduduk dunia. Selain itu, terdapat 429.64 juta orang atau 5.61 persen dari total populasi mempraktikkan berbagai

agama rakyat atau tradisional, termasuk agama tradisional Afrika, agama rakyat Tiongkok, agama penduduk asli Amerika, dan agama asli Australia. Diperkirakan 60.99 juta orang atau 0.80 persen dari populasi global menganut agama lain, termasuk agama Baha'i, Jainisme, Sikhisme, Shintoisme, Taoisme, Tenrikyo, Wicca, dan Zoroastrianisme, dan masih banyak lagi (lihat Gambar 1).

Pada saat yang sama, ditemukan bahwa sekitar satu dari tujuh orang di seluruh dunia (1.19 miliar atau 15.59 persen dari penduduk dunia) tidak memiliki afiliasi agama. Populasi yang tidak terafiliasi dengan agama termasuk ateis, agnostik dan orang-orang yang tidak mengidentifikasi dengan agama tertentu. Survei menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang tidak terafiliasi memegang beberapa keyakinan agama atau spiritual (seperti kepercayaan pada Tuhan atau roh universal) meskipun mereka tidak mengidentifikasi diri dengan keyakinan tertentu.

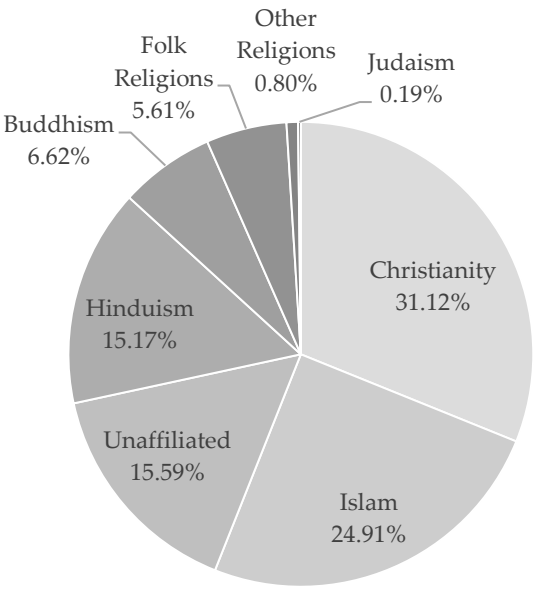

Gambar 1. Perkiraan Populasi Dunia Berdasarkan Agama pada Tahun 2020
Sumber: Hackett et al., (2015), Pew Research Center (diolah**)**

3.2 Hubungan Negara Teokrasi dan Ekonomi

Pada Mengaitkan agama dengan ekonomi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada ragam perdebatan yang cukup kontroversial tentang dampak agama pada ekonomi dan hubungan kausalitas di antara keduanya. Agama yang berbeda akan membawa preferensi politik yang berbeda dan menimbulkan perbedaan

ekonomi. Perbedaan tersebut akan menimbulkan beberapa isu baru untuk bidang analisis kebijakan ekonomi. Sering kali dalam pembuatan kebijakan ekonomi agama terlibat secara implisit dan eksplisit (Basten & Betz, 2013).

Pada masa abad pencerahan di dunia barat, terdapat pemikiran bahwa agama dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang diprakarsai oleh Marx (1844). Agama dianggap semacam opium yang menciptakan kesadaran palsu sehingga melemahkan perlawanan terhadap ketertindasan dan upaya keluar dari kemiskinan. Di sisi yang berbeda, Weber (1905) mendukung pandangan yang berlawanan. Alasan utama kemajuan dunia barat atau lahirnya kapitalisme di dunia barat adalah karena ajaran agama, khususnya agama Protestan. Kemunculan kapitalisme berkaitan erat dengan perkembangan etika agama. Hal inilah yang menyebabkan mengapa daerah lain gagal mengembangkan masyarakat ekonomi modern, meskipun kondisi alam, material, dan pasokan tenaga kerja mereka sama-sama menguntungkan. Weber merupakan salah satu ilmuan terkenal yang dirujuk sebagai penggagas awal yang mengaitkan agama dengan ekonomi. Agama dinilai mampu merangsang pertumbuhan ekonomi karena menumbuhkan sifat-sifat karakter seperti etos kerja, kejujuran, sifat hemat. Etos kerja berkaitan langsung dengan semangat untuk bekerja keras guna merebut kehidupan dunia dengan sukses. Ukuran sukses dunia juga merupakan ukuran bagi sukses di akhirat. Etos kerja yang berorientasi pada dunia meliputi kerja keras untuk meminimalkan penggunaan keuntungan sembari mengejar akumulasi profit dan menginvestasikan keuntungan. Etos kerja adalah kekuatan paling penting dibalik kemunculan kapitalisme modern.

Pemikiran Weber tersebut mendapat kritikan dari banyak pihak karena menyatakan bahwa etika Protestan-lah yang membangkitkan semangat kapitalisme di Eropa, dan pendapatnya mengenai etika utama agama-agama oriental tidak kondusif bagi perkembangan kapitalistik di Asia. Roa (1969) merangkum empat kritikan tajam, yaitu (1) ada pandangan bahwa bukan Protestantisme tetapi Katolik atau Yahudi yang bertanggung jawab atas kebangkitan kapitalisme, (2) hubungan antara kapitalisme dan agama dilihat melalui ujung teleskop yang salah, etika Protestan adalah hasil dari kebangkitan, pemikiran kapitalis, (3) tidak ada hubungan antara agama dan tindakan ekonomi, dan bahwa kebangkitan kapitalisme dapat

dijelaskan tanpa referensi agama, dan (4) tidak ada kontribusi agama sama sekali terhadap pertumbuhan ekonomi.

Benturan pemikiran Marx (1844) dan temuan Weber (1905) mengundang satu pertanyaan penting, yaitu apakah beberapa agama telah mendorong atau mengecilkan kesejahteraan ekonomi dengan memaksimalkan insentif bagi orang percaya lebih atau kurang daripada yang lain. Apakah agama yang berbeda sama-sama mendukung perkembangan kapitalis dan mendorong sikap yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi atas dasar teologis dan etis? Barro dan McCleary (2003, 2019) dan McCleary dan Barro (2006) menyatakan bahwa pada dasarnya masing-masing agama besar memiliki beberapa mekanisme untuk mempromosikan upaya kerja dan akumulasi kekayaan, yang berkontribusi pada kesuksesan ekonomi. Milik pribadi, pasar bebas, kerja sama, toleransi, kepercayaan kepada pemerintah dan sistem hukum, dan persaingan (tidak merusak) adalah nilai-nilai yang diapresiasi oleh semua agama besar yang ada.

Beberapa literatur ekonomi telah mencoba menghubungkan agama dengan kinerja ekonomi (Becker *et al*., 2021; Barro & McCleary, 2019; Mayoral & Esteban, 2019; Karachuka, 2018; Noland 2005). Salah satu ukuran utama dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu negara adalah dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita (Romer, 2019). Barro dan McCleary (2019) menyatakan bahwa dalam penelitian empiris terkini, variabel penjelas yang dianggap penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah PDB per kapita, modal manusia, tingkat tabungan, keterbukaan perdagangan, pengeluaran pemerintah, lingkungan politik dan kelembagaan, serta supremasi hukum. Mereka berpendapat bahwa untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi, tidak cukup hanya dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga harus diperluas pada aspek budaya. Di dalam buku mereka yang berjudul “The Wealth of Religions: The Political Economy of Believing and Belonging", dijelaskan bahwa agama memiliki potensi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat. Mereka mencatat bahwa agama-agama yang mendorong prinsip-prinsip seperti etos kerja keras, pendidikan, dan pengelolaan keuangan cenderung memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Keyakinan agama ini dapat memotivasi individu untuk lebih berinvestasi dalam pendidikan, bekerja lebih

keras, dan mengelola keuangan mereka dengan bijaksana. Dengan kata lain, agama dapat menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam pembentukan modal manusia dan kemajuan ekonomi. Menurut mereka, keyakinan agama individu dan kelompok dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap kebijakan seperti pajak, belanja pemerintah, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Ini berarti bahwa agama dapat berdampak pada arah kebijakan ekonomi suatu negara. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana agama tidak hanya memengaruhi perilaku ekonomi individu, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan pemerintah yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan itu, agama merupakan bagian penting dalam budaya. Sudut pandang ini sejalan dengan pemikiran Weber (1905). Dengan memasukkan semua aspek dalam penelitian, mereka menemukan apabila semakin tinggi kepercayaan terhadap siksaan neraka, akan mendorong manusia untuk melakukan hal baik, dan jika peningkatan ini berarti meningkatkan upaya kerja, penghematan, kejujuran, dan sebagainya, maka masuk akal bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Pada dasarnya, hasil serupa diperoleh jika mengganti variabel kepercayaan pada neraka dengan kepercayaan pada surga. Dalam kajian Nelson (2014) dinyatakan bahwa agama secara historis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam literatur terbaru, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi semakin berfokus pada efek jangka panjang dari faktor geografis, sejarah, dan budaya terhadap produktivitas dan pendapatan per kapita. Faktor jangka panjang tersebut secara historis telah banyak dipengaruhi oleh agama (Spolaore & Wacziarg, 2013).

Dalam penelitian terkini terdapat beberapa temuan yang saling bertolak belakang. Hal ini memunculkan kompleksitas hubungan agama dengan ekonomi. Eum (2011) menyatakan agama adalah topik yang sensitif dan harus penuh kehati-hatian dalam menyatakan hubungannya dengan variabel ekonomi. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa tingkat religiositas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut berbeda dengan temuan Barro dan McCleary (2003) dengan menggunakan periode waktu yang berbeda. Eum (2011) juga menguji temuan Montalvo dan Reynal-Querol (2003) tentang

hubungan keberagaman agama dengan pertumbuhan ekonomi yang dianggap tidak signifikan. Hasilnya adalah fragmentasi dan polarisasi agama berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan himpunan data yang telah diperbaharui.

Sejalan dengan temuan Eum (2011), Durlauf *et al*., (2011) juga mencoba menguji temuan Barro dan McCleary (2003) menggunakan data yang sama dan melakukan replikasi sebagian besar hasil temuan mereka. Dengan menggunakan metode *bayesian moving average*, Durlauf *et al*., (2011) tidak menemukan bukti yang kuat bahwa religiositas secara kuantitatif penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tidak ada bukti bahwa keyakinan agama (seperti keyakinan akan adanya neraka atau surga) memiliki hubungan langsung yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Satu-satunya temuan mereka yang sesuai dengan temuan Barro dan McCleary (2003) adalah terdapat bukti terbatas bahwa kehadiran di tempat ibadah setiap bulan mungkin berdampak buruk pada pertumbuhan. Akan tetapi, Saqueira *et al*., (2017) menemukan hal yang berbeda dimana partisipasi dalam kegiatan keagamaan (diukur dengan kehadiran di gereja) tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Listiono (2020) mencoba menguji pengaruh agama yang diproksi dengan jumlah lembaga agama (rumah ibadah) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasilnya, secara statistik terbukti bahwa jumlah lembaga keagamaan pada agama Protestan dan Hindu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tidak ada bukti kuat bahwa jumlah lembaga keagamaan pada agama Islam dan Katolik berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya merujuk pada penelitian Wang dan Lin (2014) di China yang menggunakan jumlah lembaga keagamaan sebagai proksi dari agama, dimana lembaga Islam dan Buddha berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyarankan agar dapat menggunakan variabel lain sebagai proksi dari agama untuk memperkaya pengetahuan tentang hubungan agama dan ekonomi. Ramoutar (2021) menemukan bahwa agama yang diproksi dengan persentase masyarakat yang menganggap agama dalam kehidupan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Karachuka (2018) berpendapat peran agama dalam kinerja ekonomi terutama melalui jaringan kelompok kecil agama. Kelompok-kelompok ini membentuk

jaringan sosial yang memungkinkan individu untuk melakukan mekanisme penegakan kontrak non-formal. Kelompok agama tersebut apabila dilihat dari aspek kelembagaan dapat menciptakan modal sosial melalui jaringan yang meningkatkan kerja sama dan mengurangi biaya transaksi. Karena interaksi antara lembaga dan organisasi diharapkan dapat membentuk evolusi kelembagaan dan kinerja ekonomi. Agama-agama yang memiliki bentuk organisasi komunal daripada struktur vertikal (hierarki), sehingga memungkinkan banyak sub-komunitas denominasi yang berbeda dalam suatu masyarakat, dapat lebih bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan. Lembaga tersebut mungkin tidak hanya memberikan efisiensi alokasi dan produksi, tetapi juga efisiensi adaptif yang merupakan kunci pertumbuhan jangka panjang. Namun, efek ini dapat berubah menjadi negatif tergantung pada ini peran lembaga dalam menyebabkan permusuhan dan pengucilan kelompok.

Hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan timbal balik (Palanca, 1986). Di satu sisi agama merupakan faktor pendorong kegiatan ekonomi dan menunjukkan transformasi perubahan struktur masyarakat dan perekonomian. Namun di sisi lain, agama berubah karena dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan ekonomi. Pengaruh agama dalam pembangunan melibatkan faktor motivasi dan kelembagaan, dimana keduanya merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh tesis Weber (1905) bahwa dalam pendekatan motivasi, pertumbuhan ekonomi dirangsang oleh etika ekonomi yang diberikan oleh agama, terutama dalam etika Protestan yang mendorong aktivitas kewirausahaan dan pengumpulan kekayaan. Etika mendorong seseorang tidak hanya untuk bekerja dan mengumpulkan uang tetapi juga bagaimana menyimpan dan menginvestasikan uangnya di tempat yang produktif. Palanca melihat bahwa sikap terhadap bisnis dan pekerjaan inilah yang disebut Weber rasional, berhati-hati, merencanakan, dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam tindakan. Sedangkan dari pendekatan institusional, agama mempengaruhi budaya, perilaku, dan perubahan struktur sosial dan ekonomi.

Herzer dan Strulik (2017) menguji hubungan jangka panjang antara religiositas dan pendapatan menggunakan tingkat kehadiran di tempat ibadah. Mereka menemukan bahwa terdapat hubungan negatif jangka panjang antara tingkat religiositas dengan tingkat pendapatan, yang diukur dengan PDB per kapita.

Kausalitas jangka panjang berjalan dua arah, pendapatan yang lebih tinggi mengarah pada penurunan religiositas dan penurunan religiositas mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif dan komparatif terkait dengan hasil pembangunan ekonomi menurut hubungan agama dengan negara. Gambar 2 perubahan perubahan PDB per kapita (PPP, dalam dolar internasional konstan 2017) antara tahun 1990 dengan 2022 berdasarkan jenis hubungan antara agama dan pemerintah. Bentuk negara dalam Gambar 5 mengikuti klasifikasi yang dilakukan oleh Kishi *et al*., (2017), yaitu negara yang memiliki agama resmi, negara yang memiliki preferensi terhadap agama, negara sekuler, dan negara yang berseteru dengan institusi agama. Selama 33 tahun terakhir pendapatan per kapita penduduk dunia menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan. Negara dengan agama resmi memiliki PDB per kapita tertinggi, meningkat signifikan dari $21,742 pada tahun 1990 menjadi $30,580 pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai agama dalam struktur pemerintahan dapat menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.

Demikian pula, negara tanpa agama resmi atau yang diutamakan menunjukkan pertumbuhan yang besar, dari $13,440 pada tahun 1990 menjadi $24,640 pada tahun 2022. Negara dengan agama negara yang diutamakan atau didukung mencatat pertumbuhan moderat, dari $9,129 pada tahun 1990 menjadi $18,694 pada tahun 2022. Sementara itu, negara dengan hubungan yang bermusuhan dengan institusi keagamaan memiliki PDB per kapita terendah, meskipun juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari $5,243 pada tahun 1990 menjadi $12,977 pada tahun 2022. Data ini menyoroti hierarki yang jelas dalam kinerja ekonomi berdasarkan jenis hubungan antara agama dan negara, dengan negara beragama resmi berada di posisi teratas dan negara dengan hubungan bermusuhan berada di posisi terbawah, menunjukkan pengaruh struktur pemerintahan terhadap hasil ekonomi.

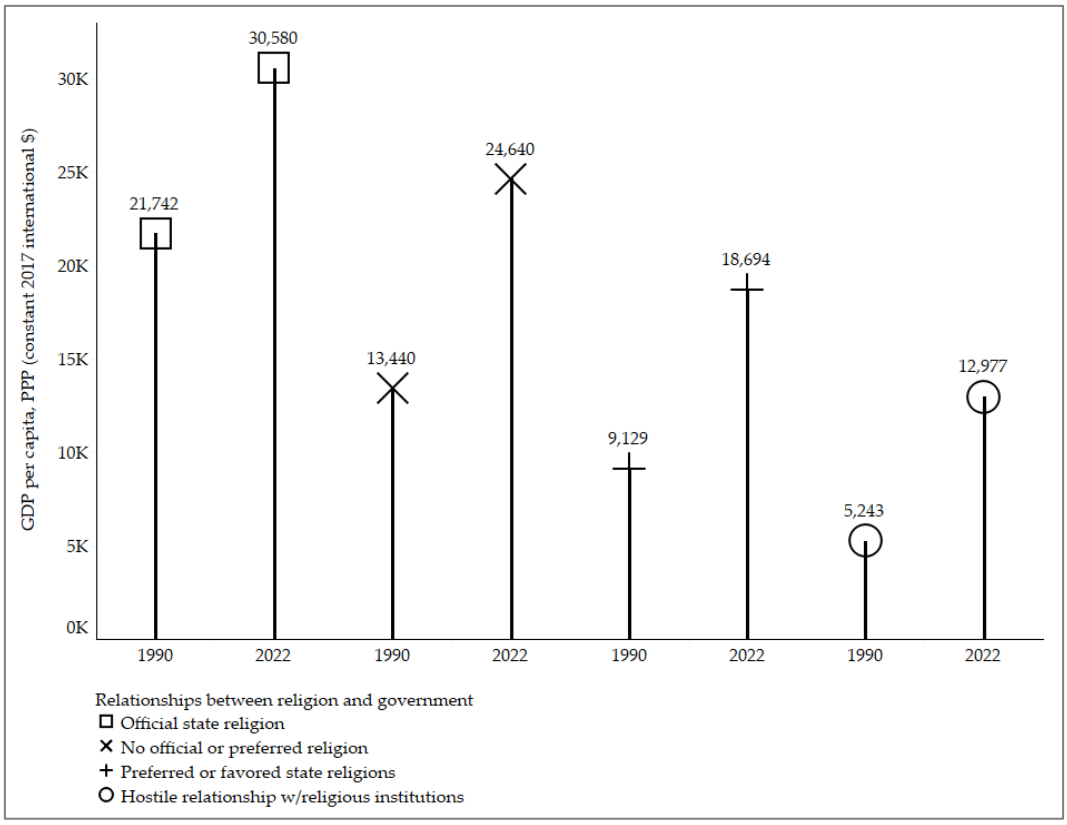

Gambar 2. Perubahan PDB Per Kapita Berdasarkan Hubungan Agama-Negara
Sumber: World Bank, 2022 (diproses)

Selanjutnya, Gambar 3 melengkapi data dari Gambar 2 dengan menyoroti PDB per kapita pada tahun 2022 berdasarkan negara dengan afiliasi agama utama, yaitu negara Yahudi, Kristen, Muslim, dan Buddha, yang memberikan perspektif tambahan terhadap hubungan antara agama dan kesejahteraan ekonomi. Negara Yahudi mencatat PDB per kapita tertinggi sebesar $44,393, diikuti oleh negara Kristen dengan $37,156, negara Muslim sebesar $27,431, dan negara Buddha dengan $4,534. Hirarki dalam kinerja ekonomi ini menggarisbawahi pengaruh signifikan hubungan antara agama dan negara terhadap hasil ekonomi (Basedau et al., 2018). Negara-negara dengan hubungan agama yang lebih positif terhadap pemerintah, cenderung memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi, seperti yang terlihat pada negara Yahudi dan Kristen dengan angka PDB tertinggi. Sebaliknya, negara Buddha, dengan PDB per kapita terendah sebesar $4,534, mungkin lebih sering ditemukan di negara dengan hubungan agama-negara yang kurang mendukung. Situasi ini menunjukkan bahwa kurangnya hubungan positif antara agama dan pemerintahan dapat menghambat pembangunan ekonomi. Ketimpangan

kinerja ekonomi di antara afiliasi agama menyoroti perlunya analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana struktur tata kelola dan konteks agama yang berbeda memengaruhi hasil ekonomi (Qayyum et al., 2019).

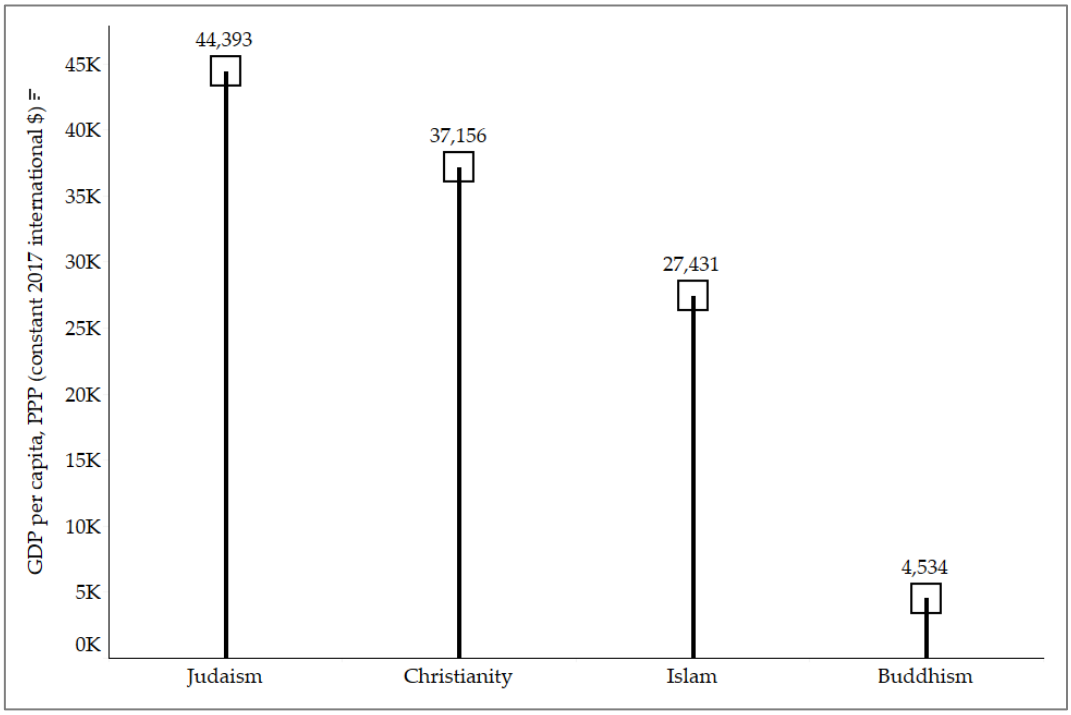

Gambar 3. Kinerja Ekonomi berdasarkan Agama Resmi Negara pada Tahun 2022
Sumber: Bank Dunia, 2022 (diolah)

Apabila dianalisis berdasarkan kelompok pendapatan, terlihat bahwa pada kelompok pendapatan tinggi, negara beragama Islam memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $64,584, diikuti oleh negara Kristen sebesar $51,789, dan negara Yahudi sebesar $44,393 (lihat Gambar 4). Data ini menunjukkan bahwa negara-negara Muslim, terlepas dari persepsi umum, dapat mencapai kinerja ekonomi yang substansial, khususnya dalam kelompok pendapatan yang lebih tinggi (Devi, 2023). Pada kelompok pendapatan menengah atas, negara Kristen mencatat PDB per kapita sebesar $19,155, sedikit lebih tinggi dibandingkan negara Islam sebesar $16,761. Sementara itu, pada kelompok pendapatan menengah bawah, negara Islam kembali menunjukkan keunggulan dengan PDB per kapita sebesar $8,515, jauh lebih tinggi dibandingkan negara Buddha ($4,534) dan negara Kristen ($3,366). Pengamatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara agama resmi negara dan kinerja ekonomi dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks pendapatan negara. Kompleksitas faktor struktural dan historis yang memengaruhi ekonomi ini

terbukti, karena negara-negara dengan struktur tata kelola yang mendukung yang mengintegrasikan nilai-nilai agama cenderung berkinerja lebih baik secara ekonomi (Navarro & Skirbekk, 2018). Selain itu, kesenjangan antar afiliasi agama dan kelompok pendapatan menggarisbawahi pentingnya menganalisis bagaimana tata kelola, kebijakan ekonomi, dan konteks agama berinteraksi untuk membentuk hasil ekonomi. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dinamika ini saat merumuskan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan dalam dan antar komunitas agama (Stolz & Usunier, 2019).

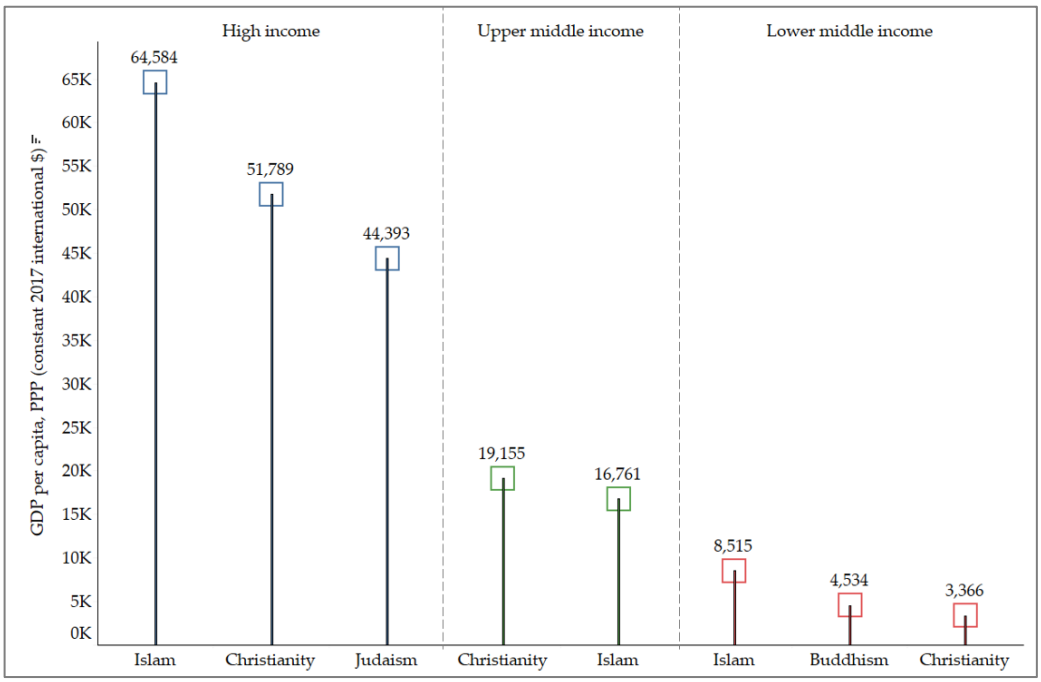

Gambar 4. Kinerja Ekonomi berdasarkan Kelompok Pendapatan dan Agama Resmi Negara pada Tahun 2022
Sumber: Bank Dunia, 2022 (diolah)

Gambar 5 memberikan rincian lebih lanjut tentang kinerja ekonomi berdasarkan PDB per kapita (PPP) pada tahun 2022 dari negara-negara dengan agama resmi, yang melengkapi informasi pada Gambar 4 sebelumnya. Dari data ini, terlihat bahwa negara-negara Islam menunjukkan variasi kinerja ekonomi yang signifikan. Qatar memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $96,558, diikuti oleh Uni Emirat Arab dengan $74,918, Bahrain $51,855, dan Arab Saudi $50,188. Angka-angka ini menunjukkan bahwa negara-negara Islam tertentu telah berhasil memanfaatkan sumber daya alam dan struktur tata kelola mereka untuk mencapai

tingkat kemakmuran ekonomi yang tinggi (Boukhatem & Moussa, 2018). Kekayaan yang substansial di negara-negara ini dapat dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya minyak dan gas yang efektif, serta sistem keuangan yang kuat yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Quadri, 2023). Negara-negara Islam seperti Kuwait, Malaysia, dan Maladewa juga mencatat angka PDB per kapita yang kompetitif, masing-masing sebesar $49,400, $28,384, dan $21,271. Sebaliknya, negara-negara Islam seperti Pakistan ($5,377) dan Mauritania ($5,330) menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih rendah, mencerminkan adanya kesenjangan yang besar di antara negara-negara yang memiliki agama resmi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat rentang kinerja ekonomi yang lebih luas di antara negara-negara Islam, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas tata kelola, diversifikasi ekonomi, dan investasi dalam modal manusia (Bardiah, 2024; Adom, 2024).

Di sisi lain, negara-negara Kristen juga menunjukkan kinerja ekonomi yang bervariasi, dengan Norwegia mencatat PDB per kapita tertinggi sebesar $67,296, diikuti oleh Denmark ($59,935) dan Islandia ($55,567). Negara-negara Kristen lainnya, seperti Yunani ($31,704), Republik Dominika ($19,338), dan Armenia ($16,057), mencatat PDB per kapita yang lebih rendah. Selain itu, negara dengan agama resmi Yudaisme, yaitu Israel, mencatat PDB per kapita sebesar $44,393, sementara negara dengan agama resmi Buddha, Kamboja, mencatat PDB per kapita terendah sebesar $4,534. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun agama resmi dapat menjadi salah satu faktor penting dalam struktur negara, kinerja ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sumber daya alam, kebijakan pemerintah, dan tingkat pembangunan sosial. Gambar 5 mempertegas kesenjangan ekonomi tidak hanya antaragama resmi negara tetapi juga di antara negara-negara dalam satu agama resmi.

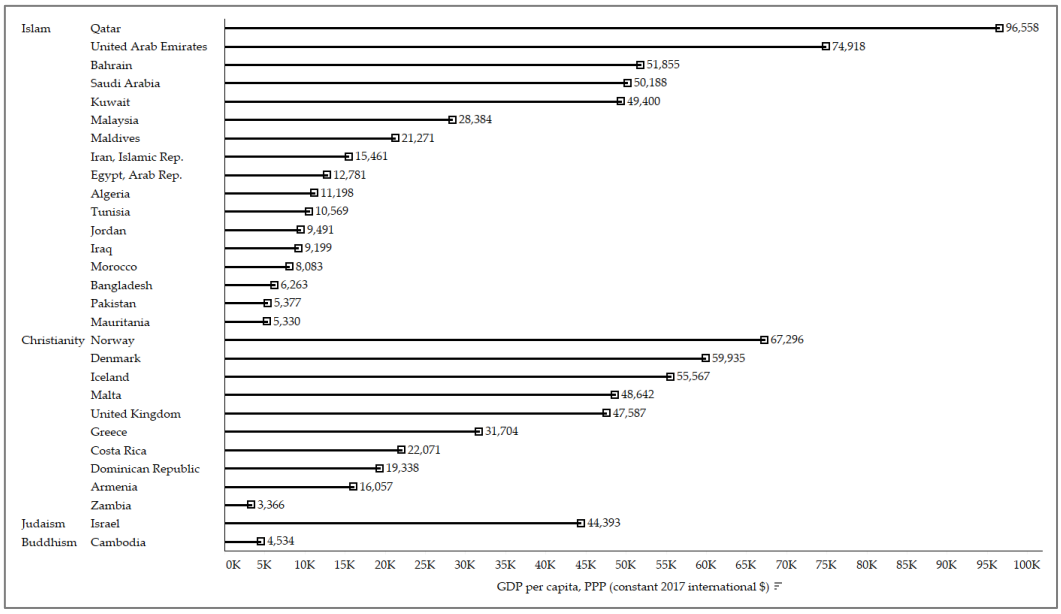

Gambar 5. Kinerja Ekonomi Negara-negara dengan Agama Resmi Negara pada Tahun 2022
Sumber: Bank Dunia, 2022 (diolah)

Hubungan antara agama resmi suatu negara dan kinerja ekonominya menunjukkan bahwa struktur institusional agama dapat memengaruhi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Salah satu sebab utama perbedaan ini adalah bagaimana agama digunakan sebagai alat legitimasi politik dan sosial oleh pemerintah (Turbucz, 2023). Negara dengan agama resmi cenderung memiliki struktur pemerintahan yang stabil karena agama dapat memberikan landasan moral dan etika yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Fox & Breslawski, 2023). Namun, stabilitas ini tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja ekonomi, karena masih bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam, mengimplementasikan kebijakan pembangunan, pendidikan dan modal manusia, dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah (Zapotichna, 2022; Autiero, 2018; Del-Castillo-Feito et al., 2020).

Perbedaan signifikan dalam kinerja ekonomi antar negara dalam satu kelompok agama resmi juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sumber daya alam dan tata kelola pemerintahan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan agama itu sendiri. Negara-negara kaya sumber daya, seperti Qatar dan Norwegia, mampu memanfaatkan sumber daya alam dan stuktur tata kelola mereka untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi (Kuran, 2018; Bardiah & Herawi,

2024). Kekayaan Qatar dari minyak dan gas telah memungkinkannya mencapai PDB per kapita dan tingkat kesejahteraan yang tinggi, sementara Norwegia, dengan negara kesejahteraan yang kuat dan tata kelola yang efektif, telah memanfaatkan sumber dayanya untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, negara-negara dengan sumber daya terbatas dan tata kelola yang lemah, seperti Mauritania atau Zambia, menghadapi tantangan dalam meningkatkan PDB per kapita meskipun memiliki agama resmi yang sama. Hal ini menegaskan bahwa agama resmi hanya menjadi salah satu elemen dari sistem yang lebih kompleks dalam menentukan kinerja ekonomi suatu negara (Petach, 2023).

Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, terutama di negara-negara dengan agama resmi. Sementara agama dapat memberikan stabilitas politik dan landasan sosial, kebijakan ekonomi yang inklusif dan berbasis pada pembangunan berkelanjutan tetap menjadi faktor utama untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu, pengelolaan hubungan antara agama dan negara harus memastikan bahwa agama tidak menjadi sumber eksklusivitas atau diskriminasi yang dapat menghambat partisipasi ekonomi kelompok lain (Handoko, 2024; Zagonari, 2024; Mawardi et al., 2023; Aman et al., 2019). Dengan mempertimbangkan faktor struktural dan institusional secara holistik, negara dapat menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Busro, 2024; Kulzhanova et al., 2021; Renger et al., 2024).

4 PENUTUP

Penelitian menyoroti hubungan yang dinamis dan kompleks antara agama, negara, dan ekonomi. Agama, ketika diintegrasikan dalam sistem konstitusi negara, sering berfungsi sebagai landasan moral yang memperkuat legitimasi politik dan stabilitas sosial. Negara dengan agama resmi umumnya menunjukkan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, sebagaimana terlihat dari indikator pendapatan per kapita yang signifikan. Namun, stabilitas dan kinerja ekonomi ini tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh agama semata. Faktor-faktor seperti tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang bijaksana, serta investasi dalam pendidikan dan modal manusia memainkan peran penting dalam menentukan hasil ekonomi.

Variasi kinerja ekonomi di antara negara-negara dengan agama resmi mencerminkan pentingnya konteks lokal. Beberapa negara, seperti Qatar dan Norwegia, mampu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan sistem tata kelola yang kuat untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sebaliknya, negara-negara dengan sumber daya terbatas atau tata kelola yang lemah, seperti Mauritania, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa agama resmi tidak selalu menjadi penentu utama kemakmuran, tetapi lebih berfungsi sebagai salah satu elemen dalam sistem yang lebih besar yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan kebijakan pembangunan.

Untuk itu, kebijakan yang mendukung integrasi nilai-nilai agama dengan prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan perlu dirumuskan secara hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa keberadaan agama dalam sistem politik tidak menjadi sumber diskriminasi, melainkan alat untuk mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas. Diversifikasi ekonomi, investasi dalam modal manusia, dan peningkatan tata kelola adalah langkah-langkah penting yang dapat memastikan bahwa agama, sebagai landasan sosial dan moral, juga dapat berkontribusi secara konstruktif terhadap pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara stabilitas sosial yang disediakan oleh agama resmi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang progresif dapat menjadi pilar utama dalam mencapai kemakmuran bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Adhistia, Suci Kirani, Ellya Roza, and Perisi Nopel. "The Title of the Growth of New Dynasties in Spain Maghrib and Iran." *Education Achievement: Journal of Science and Research* 5, no. 2 (2024): 221-231. https://doi.org/10.51178/jsr.v5i2.1834

Adom, Philip Kofi, Samuel Adams, and Dorian Ashun. "Economic Prosperity and Religion Nexus in Africa: Analysing the Innovation and Labor Market Channels." Preprint (Version 1) (2024). https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4229492/v1

Aguinis, Herman. *Research Methodology: Best Practices for Rigorous, Credible, and Impactful Research*. Thousand Oaks: Sage Publication, 2024. Google

Agusalim, Lestari, and Muhamad Karim. "How Religiosity Affect Climate Change? A Cross-Country Analysis." *International Journal of Energy Economics and Policy* 14, no. 1 (2024a): 150-164. https://doi.org/10.32479/ijeep.15166

Agusalim, Lestari, and Muhamad Karim. "Religiosity and Climate Change: An Eco-Religious Approach." *Environmental & Socio-Economic Studies* 12, no. 1 (2024b): 35-50. https://doi.org/10.2478/environ-2024-0004

Agusalim, Lestari, and Yoga Setiawan. "COVID-19, Economic Growth, and Income Inequality: Empirical Study in Indonesia." *Economics Development Analysis Journal* 13, no. 4 (2024). https://doi.org/10.15294/edaj.v13i4.3107

Agusalim, Lestari, dan Muhamad Karim. *Transformasi Ajaran Agama Melawan Krisis Iklim*. Bogor: IPB Press, 2023. Google

Agusalim, Lestari, Jovan Irwan Pratama, Puguh Prasetyoputra, Mangasi Panjaitan, and Amin Tunda. "Understanding the Socio-Economic Dynamics: COVID-19 Pandemic, Human Development, and Poverty Issues in Indonesia." *Iranian Economic Review* (2024). Inpress. https://doi.org/10.22059/ier.2024.378653.1008045

Agusalim, Lestari, Lukytawati Anggraeni, and Syamsul H. Pasaribu. "The Economy of Indonesia: Driven by Physical or Human Capital?." *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 15, no. 1 (2022): 10-28. https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.34418

Agusalim, Lestari, Muhamad Karim, Mohammad Iqbal Irfany, Aprima Vista Ajeng Lestari, and Herlina Pebrianti. "Economic Development and Climate Change: Insights from Religious Countries." *International Journal of Energy Economics and Policy* 15, no. 2 (2025): 58-83. https://doi.org/10.32479/ijeep.17975

Agusalim, Lestari, Muhammad Ilham Alfiansyah, Puguh Prasetyoputra, and Riko Noviantoro. "Examining the Economic Impact of Corruption: Are Differences Between the Cleanest and Most Corrupt Countries Before and During COVID-19?." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 9, no. 1 (2025): 1-28.* https://doi.org/10.24034/j25485024.y2025.v9.i1.6929

Alon, Ilan, Shaomin Li, and Jun Wu. "An Institutional Perspective on Religious Freedom and Economic Growth." *Politics and Religion* 10, no. 3 (2017): 689-716. https://doi.org/10.1017/S1755048317000098

Aman, Jaffar, Jaffar Abbas, Shahid Mahmood, Mohammad Nurunnabi, and Shaher Bano. "The Influence of Islamic Religiosity on the Perceived Socio-Cultural Impact of Sustainable Tourism Development in Pakistan: A Structural Equation Modeling Approach." *Sustainability* 11, no. 11 (2019): 3039. https://doi.org/10.3390/su11113039

Autiero, Giuseppina. "Secular Education and Religious Values in the Formation of Human Capital." *International Journal of Development Issues* 17, no. 1 (2018): 55-68. https://doi.org/10.1108/IJDI-06-2017-0103

Bardiah, Diah, and Saeed Herawi. "The Role of Religion in Economic Decision Making." *Jurnal Al-Sirat* 24, no. 1 (2024): 212-221. https://doi.org/10.47760/cognizance.2024.v04i01.009

Barro, Robert J., and Rachel M. McCleary. "International Determinants of Religiosity (No. 10147)." *National Bureau of Economic Research, Inc*. (2003b). https://doi.org/10.3386/w10147

Barro, Robert J., and Rachel M. McCleary. "Religion and Economic Growth Across Countries." *American Sociological Review* 68, no. 5 (2003a): 760-781. https://doi.org/10.1177/000312240306800505

Barro, Robert J., and Rachel M. McCleary. *The Wealth of Religions: The Political Economy of Believing and Belonging*. New Jersey: Princeton University Press, 2021. Google

Basedau, Matthias, Simone Gobien, and Sebastian Prediger. "The multidimensional effects of religion on socioeconomic development: A review of the empirical literature." *Journal of Economic Surveys* 32, no. 4 (2018): 1106-1133. https://doi.org/10.1111/joes.12250

Basten, Christoph, and Frank Betz. "Beyond work ethic: Religion, Individual, and Political Preferences." *American Economic Journal: Economic Policy* 5, no. 3 (2013): 67-91. https://doi.org/10.1257/pol.5.3.67

Becker, Sascha O., Jared Rubin, and Ludger Woessmann. "Religion in Economic History: A Survey." *The handbook of historical economics* (2021): 585-639. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815874-6.00029-0

Becker, Sascha O., Jared Rubin, and Ludger Woessmann. "Religion in Economic History: A Survey." *The handbook of Historical Economics* (2021): 585-639. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815874-6.00029-0

Blanco-González, Alicia, Giorgia Miotto, and Francisco Díez-Martín. "Politics and Regionality: Does Region of Residence Affect the State's Legitimacy?." *American Behavioral Scientist* 65, no. 3 (2021): 465-481. https://doi.org/10.1177/0002764220975048

Boukhatem, Jamel, and Fatma Ben Moussa. "The Effect of Islamic Banks on GDP Growth: Some Evidence from Selected MENA Countries." *Borsa Istanbul Review* 18, no. 3 (2018): 231-247. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.004

Busro, Busro. "Reflections on Religious, Cultural, and Political Dynamics in Contemporary Studies." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 8, no. 1 (2024): v-xiv. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v8i1.38927

Coşgel, Metin M., Richard N. Langlois, and Thomas J. Miceli. "Identity, Religion, and the State: The Origin of Theocracy." *Journal of Economic Behavior & Organization* 179 (2020): 608-622. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.09.026

Del-Castillo-Feito, Cristina, Gabriel Cachón-Rodríguez, and Iria Paz-Gil. "Political

Disaffection, Sociodemographic, and Psychographic Variables as State Legitimacy Determinants in the European Union." *American Behavioral Scientist* 66, no. 1 (2022): 86-105. https://doi.org/10.1177/0002764220981116

Desky, Ahmed Fernanda. "The Controversy of Muhammad Baqir Ash-Sadr's Thoughts (Eastern Capitalist) with the Thoughts of Karl Marx and Max Weber (Western Capitalists) in the Context of Global Islamic Economic System." *International Journal Ihya"Ulum al-Din* 24, no. 1 (2022): 15-30. https://doi.org/10.21580/ihya.24.1.7914

Devi, Abrista. "Governance Performance of Muslim and Non-Muslim Countries." *Management and Sustainability* 2, no. 2 (2023): 1-6. https://doi.org/10.58968/ms.v2i2.387

Dubey, Umesh Kumar B., and Dwarkadas Pralhaddas Kothari. *Research Methodology: Techniques and Trends*. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2022. https://doi.org/10.1201/9781315167138

Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press, 1912. Google

Durlauf, Steven N., Andros Kourtellos, and Chih Ming Tan. "Is God in the Details? A Reexamination of the Role of Religion in Economic Growth." *Journal of Applied Econometrics* 27, no. 7 (2012): 1059-1075. https://doi.org/10.1002/jae.1245

Eum, Wonsub. *Religion and Economic Development - A Study on Religious Variables Influencing GDP Growth Over Countries*. Berkeley: University of California, 2011. Google

Fox, Jonathan, and Jori Breslawski. "State Support for Religion and Government Legitimacy in Christian-Majority Countries." *American Political Science Review* 117, no. 4 (2023): 1395-1409. https://doi.org/10.1017/S0003055422001320

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books Inc, 1973. Google

Goldstein, Warren S. "On the Religious State, the Secular State, and the Religion-Neutral State." *Critical Research on Religion* 10, no. 1 (2022): 3-6. https://doi.org/10.1177/20503032221081837

Golo, Ben-Willie Kwaku, and Ernestina Novieto. "Religion and Sustainable Development in Africa: Neo-Pentecostal Economies in Perspectiv." *Religion and Development* 1, no. 1 (2022): 73-95. https://doi.org/10.30965/27507955-20220005

Hackett, Conrad, Phillip Connor, Marcin Stonawski, and Vegard Skirbekk. *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*. Washington, DC: Pew Research Center, 2015. Google

Handoko, Agus. "Paradigm of the Relationship of Religion and the State." *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 2 (2024): 271-284. https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i2.243

Heidl, Sára Eszter. "Religionesque: A Term for Dealing with Contemporary Alternative Religious Forms in Empirical Studies." *Spirituality Studies* 9, no. 2 (2023): 18-27. Google

Herzer, Dierk, and Holger Strulik. "Religiosity and Income: A Panel Cointegration and Causality Analysis." *Applied Economics* 49, no. 30 (2017): 2922-2938.

https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1251562
Hirschl, Ran. "Theocracy." In *Routledge Handbook of Illiberalism*, pp. 152-163. Milton Park: Routledge, 2021. https://doi.org/10.4324/9780367260569-13
Irijanto, Tubagus Thresna, Mohd Azlan Shah, and Abdul Ghafar Ismail. "The Thoughts of Economic Growth Theories of Classical Muslim Scholars, A Contribution." *TRIKONOMIKA* 12, no. 2 (2013): 168-189. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v12i2.478
Johnson, Noel D., and Mark Koyama. *Persecution & Toleration: The Long Road to Religious Freedom*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https://doi.org/10.1017/9781108348102
Karaçuka, Mehmet. "Religion and Economic Development in History: Institutions and the Role of Religious Networks." *Journal of Economic Issues* 52, no. 1 (2018): 57-79. https://doi.org/10.1080/00213624.2018.1430941
Khalfaoui, Hamdi, and Hassan Guenichi. "Does Islam promote growth: evidence from Arab Muslim countries and non-Arab Muslim countries." *International Journal of Law and Management* 64, no. 2 (2022): 206-224. https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0166
Khan, Foyasal, and Mohamed Aslam Haneef. "Religious Responses to Sustainable Development Goals: An Islamic Perspective." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8, no. 2 (2022): 161-180. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453
Kishi, Katayoun, Alan Cooperman, Gregiry A. Smith, Samirah Majumdar, Juan Carlos Esparza Ochoa, Becka A. Alper, Jonathan Evans. *Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially*. Washington, DC: Pew Research Center, 2017. Google
Kulzhanova, Gulbaram T., Zhuldizay T. Kulzhanova, and Larisa A. Efimov. "Human Capital and Sustainable Development in a Religious Context." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 8, no. 3 (2021): 169-182. https://doi.org/10.29333/ejecs/757
Kuran, Timur. "Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links." *Journal of Economic Literature* 56, no. 4 (2018): 1292-1359. https://doi.org/10.1257/jel.20171243
Listiono, Listiono. "The Impact of Religious Institutions on Economic Growth in Indonesia: Evidence from Selected Province." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 16, no. 1 (2020): 40-57. https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2020.0112.40-57
Majeed, Muhammad Tariq. "Social capital and economic performance of the Muslim world: Islamic perspectives and empirical evidence." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 4 (2019): 601-622. https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2018-0057
Marx, Karl. "Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right." *Sociology and Religion 7*, no. 10 (1995): 3-4. Google
Mawardi, Mawardi, Hasni Hasni, Deni Miharja, and Busro Busro. "Harmony in Diversity: An Exploration of Peaceful Coexistence between Muslim and Christian Communities in Aceh, Indonesia." *Khazanah Sosial* 5, no. 1 (2023): 152-164. https://doi.org/10.15575/ks.v5i1.25168
Mayoral, Laura, and Joan Esteban. "Religiosity and Economic Performance: The Role of Personal Liberties." In *Advances in the Economics of Religion*, pp.

405-422. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98848-1_25
McCleary, Rachel M., and Robert J. Barro. "Religion and Political Economy in an International Panel." *Journal for the Scientific Study of Religion* 45, no. 2 (2006): 149-175. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2006.00299.x
Minárik, Pavol. "The Economics of Religion in a Globalizing World: Communist China and Post-Communist Central Europe." In *SHS Web of Conferences*, vol. 92, p. 07041. EDP Sciences, 2021. https://doi.org/10.1051/shsconf/20219207041
Montalvo, Jose G., and Marta Reynal-Querol. "Religious Polarization and Economic Development." *Economics Letters* 80, no. 2 (2003): 201-210. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(03)00080-6
Morreall, John, and Tamara Sonn. *Myth 1: All Societies Have Religions. In 50 Great Myths of Religion*. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014. Google
Navarro, Jose, and Vegard Skirbekk. "Income Inequality and Religion Globally 1970–2050." *Scripta Instituti Donneriani Aboensis* 28 (2018): 175-199. https://doi.org/10.30674/scripta.70072
Nelson, Robert H. "Bringing Religion into Economic Policy Analysis." *Regulation* 37 (2014): 52. https://doi.org/10.2139/ssrn.2364607
Noland, Marcus. "Religion and Economic Performance." *World development* 33, no. 8 (2005): 1215-1232. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.006
Nongbri, Brent. *Before Religion: A History of a Modern Concept*. New Haven: Yale University Press, 2013. https://doi.org/10.12987/yale/9780300154160.001.0001
Nyirkos, Tamás. "The Concept of "Political Religion:" A Historical Overview." *Politica e Religione* (2024): 169-194. Google
Öhlmann, Philipp. "Diaconia and Development: The Study of Religious Social Practice as Lead Discipline in the Religion and Development Debate." *Religions* 14, no. 8 (2023): 1032. https://doi.org/10.3390/rel14081032
Ottuh, Peter OO, and Eboh Akpotor. "Analysis of religious economy and its participation rates in Nigeria." *KIU Interdisciplinary Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2021): 240-261. https://doi.org/10.59568/KIJHUS-2021-2-1-15
Öztürk, Ahmet Erdi, and Bahar Baser. "The Transnational Politics of Religion: Turkey's Diyanet, Islamic Communities and Beyond." In *Theoretical Approaches to Turkish Foreign Policy*, pp. 57-77. Routledge, 2023. https://doi.org/10.4324/9781003357643-4
Palanca, Ellen H. "Religion and economic development." *Philippine studies* (1986): 162-180. https://doi.org/10.13185/2244-1638.1439
Petach, Luke, and Aiden Powell. "Religion and Economic Growth: Evidence from US Counties." *Review of Regional Studies* 53, no. 2 (2023): 192-210. https://doi.org/10.52324/001c.87680
Qayyum, Unbreen, Sohail Anjum, and Samina Sabir. "Religion and Economic Development: New Insights." *Empirica* 47 (2020): 793-834. https://doi.org/10.1007/s10663-019-09456-3
Quadri, Faruq Umar, Oluwaseun Oladeji Olaniyi, and Olugbenga Olaposi Olaoye. "Interplay of Islam and economic growth: Unveiling the long-run dynamics

in Muslim and Non-Muslim countries." *Asian Journal of Education and Social Studies* 49, no. 4 (2023): 483-498. https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v49i41226

Quadri, Faruq, Oluwaseun Oladeji Olaniyi, and Olugbenga O. Olaoye. "Interplay of Islam and Economic Growth: Unveiling the Long-Run Dynamics in Muslim and Non-Muslim Countries." *Asian Journal of Education and Social Studies* 49, no. 4 (2023): 483-498. https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v49i41226

Ramoutar, Richard S. "Do Culture and Religion Matter to Economic Growth?" *Research in Economics and Management*, 7, no. 2 (2022): 16-28. https://doi.org/10.22158/rem.v7n2p16

Rao, M. S. A. "Religion and Economic Development." *Sociological bulletin* 18, no. 1 (1969): 1-15. https://doi.org/10.1177/0038022919690101

Renger, Almut-Barbara, Juliane Stork, and Philipp Öhlmann. "Religion and Ecology: Perspectives on Environment and Sustainability across Religious Traditions." *Religion and Development* 2, no. 3 (2024): 339-350. https://doi.org/10.30965/27507955-20230030

Romer, David. *Advanced Macroeconomics (Fifth Edition)*. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2019. Google

Sequeira, Tiago Neves, Ricardo Viegas, and Alexandra Ferreira-Lopes. "Income and Religion: A Heterogeneous Panel Data Analysis." *Review of Social economy* 75, no. 2 (2017): 139-158. https://doi.org/10.1080/00346764.2016.1195640

Spolaore, Enrico, and Romain Wacziarg. "How Deep are the Roots of Economic Development?." *Journal of Economic Literature* 51, no. 2 (2013): 325-369. https://doi.org/10.1257/jel.51.2.325

Stolz, Joerg, and Jean-Claude Usunier. "Religions as brands? Religion and spirituality in consumer society." *Journal of Management, Spirituality & Religion* 16, no. 1 (2019): 6-31. https://doi.org/10.1080/14766086.2018.1445008

Turbucz, Dávid. "Nation Building and Religion: The Horthy Cult in Hungary between 1919 and 1944." *Historical Studies on Central Europe* 3, no. 2 (2023): 68-89. https://doi.org/10.47074/HSCE.2023-2.05

Wang, Qunyong, and Xinyu Lin. "Does Religious Beliefs Affect Economic Growth? Evidence from Provincial-Level Panel Data in China." *China Economic Review* 31 (2014): 277-287. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.10.006

Watts, Galen, and Dick Houtman. "Introduction: Spirituality—Privatized Pseudo-Religion?." In *The Shape of Spirituality*, pp. 1-38. Columbia University Press, 2024. https://doi.org/10.7312/hout21684-002

Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Unwin University Books, 1905. Google

Yusuf, Yusuf. "The Role of Pancasila in View from the Sociology of Religion in the Globalisation Era." *Journal of Business Social and Technology* 4, no. 1 (2023): 87-97. https://doi.org/10.59261/jbt.v4i1.120

Zagonari, Fabio. "Both Religious and Secular Ethics to Achieve Both Happiness and Health: Panel Data Results Based on a Dynamic Theoretical Model." *PLoS ONE*, no. 4 (2024): e0301905.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301905
Zapotichna, R. (2022). “An Overview of the Relationship Between Religion and Economic Development: The Case of the Middle East”. *Matter of the International Scientific Conference: XXV Oriental Studies* (2022): 319. https://doi.org/10.36059/978-966-397-283-1-83
Zou, Patrick XW, and Xiaoxiao Xu. *Research Methodology and Strategy: Theory and Practice*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2023. https://doi.org/10.1002/9781394190256